

PERSPEKTIF LOKAL TENTANG DESA WISATA: NARASI DARI PARA TOKOH DI RUMAH BETANG ENSAID PANJANG

Markus

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Email: markusfisip@gmail.com

Abstrak:Desa Ensaid Panjang yang berada di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat adalah kawasan yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata dimana icon yang paling penting di dalamnya yaitu rumah betang yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya . Akan tetapi, kontradiktif dengan statusnya tersebut, pariwisata belum memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosio-kultural maupun ekologis. Sejauh ini berdasarkan perspektif lokal, upaya untuk melibatkan komunitas setempat untuk aktif mengelola pariwisata masih bersifat *top-down*, sporadis dan lintas sektoral. Pendekatan pembangunan pariwisata seperti ini tentu saja memperkecil ruang gerak masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih luas dan memiliki kontrol atas pengelolaan pariwisata. Sementara salah satu prasyarat untuk tercapainya pariwisata berkelanjutan adalah partisipasi aktif masyarakat lokal dalam keseluruhan proses pengembangan pariwisata, mulai dari perencanaan hingga implementasinya.

Kata Kunci: Desa wisata, Partisipasi, Perspektif Lokal

Pendahuluan

Partisipasi masyarakat lokal merupakan salah satu elemen inti dari pengembangan pariwisata karena sangat erat kaitannya dengan keberlanjutan industri pariwisata itu sendiri. Ada beberapa sektor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata seperti pemerintah, sektor swasta, berbagai organisasi, dan individu. Namun, dalam daftar keterlibatan tersebut, masyarakat lokal mungkin satu-satunya pemangku kepentingan yang sah dan bermoral dalam pengembangan pariwisata.

Keterlibatan masyarakat lokal memiliki nilai substansial dalam pariwisata bagi penduduk setempat, gaya hidup dan faktor lingkungan, budaya dan tradisional mereka, yang tidak lain adalah daya tarik utama dalam pariwisata. Oleh karena itu, kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat harus dijaga. Pengembangan kepariwisataan yang disertai dengan keterlibatan masyarakat lokal akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan serta manfaat ekonomi, lingkungan dan budaya.

Berangkat dari berbagai pertimbangan di atas maka hal yang perlu dikaji dalam pengelolaan desa wisata antara lain tingkat partisipasi masyarakat setempat dalam rangkaian aktivitas seperti perencanaan, pengambilan keputusan dan kontrol, pembagian keuntungan, transparansi, investasi dan aspek pemberdayaan masyarakat lokal. Seiring pesatnya perkembangan pariwisata dunia khususnya yang berbasis budaya, isu seputar keadilan sosial dan partisipasi masyarakat lokal semakin kuat dikumandangkan.

Meskipun pelestarian alam dan pengentasan kemiskinan masih menjadi fokus dalam konsep pembangunan berkelanjutan, dalam kurang lebih tiga dekade terakhir penekanan dalam kegiatan-kegiatan yang mengusung konsep pembangunan berkelanjutan lebih banyak diarahkan pada partisipasi dan kontrol masyarakat lokal. Ide seputar pembangunan berkelanjutan sesungguhnya berevolusi dari konsep yang dahulu sepenuhnya berpusat pada perlindungan lingkungan hidup kini bergeser kearah keadilan (*equity*) dalam mengakses sumberdaya alam (Hunter dalam Cox dan Cusick, 2006). Hal yang

tidak bisa dikesampingkan dalam konsep pembangunan berkelanjutan dewasa ini adalah pelibatan masyarakat lokal sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) utama sepanjang proses pembangunan.

Desa Wisata sebagai salah satu agen pembangunan berkelanjutan juga menerapkan paradigma di atas, sehingga lahirlah konsep pariwisata berbasis komunitas (*community-based tourism*). Konsep inimenempatkan desa wisata berada di bawah kontrol masyarakat setempat dimana masyarakat sebagai pemilik atraksi wisata ikut terlibat secara aktif di dalam pengelolaannya (Drumm, 1998). Pariwisata berbasis komunitas adalah istilah yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan inisiatif yang memperhatikan lingkungan sekaligus memberi ruang kendali yang besar kepada masyarakat lokal sehingga aktivitas yang melibatkan mereka mampu mendatangkan keuntungan yang signifikan bagi masyarakat setempat (Liu, 1994). Masyarakat lokal dilibatkan dalam mengidentifikasi produk wisata setempat, termasuk dalam pengembangan dan pemasarannya (Kiss, 2004).

Pelibatan masyarakat lokal merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan desa wisata karena beberapa alasan prinsip. Pertama, kemiskinan dan disparitas sosial yang dialami masyarakat di negara berkembang memerlukan kontribusi sektor pariwisata dalam memperbaiki kesejahteraan mereka sehingga pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengembangan pariwisata menjadi prasyarat penting menuju pariwisata berkelanjutan (Hitchcock *et al.*, dalam Liu 2003). Kedua, karena desa wisata bisa berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif maka masyarakat lokal yang merasakan dampak dari kegiatan pariwisata di daerahnya harus mendapatkan perhatian dalam pengelolaan ekowisata (Gilbert dalam Eshun dan Tonto, 2014). Ketiga, masyarakat lokal berhak dan wajib dilibatkan dalam perencanaan dan pengimplementasian proyek-proyek pariwisata di lingkungan mereka sebab masyarakat setempat akan merasakan dampak sosial dan lingkungan yang timbul karena mereka hidup di tempat itu secara permanen

(Kiss, 2004). Dampak tersebut umumnya berupa perubahan gaya hidup masyarakat lokal dimana cara hidup yang mengandalkan sumber daya tradisional tidak lagi sejalan dengan tujuan perlindungan alam yang dikumandangkan dalam ekowisa. Alasan berikutnya karena pelibatan masyarakat lokal dalam desa wisata bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat lokal pada aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya alam seperti pertanian skala komersil, berburu dan pembalakan hutan (Langholz, dalam Su *et al.*, 2014). Selain hal-hal di atas, partisipasi masyarakat lokal diperlukan tidak hanya agar diperoleh komitmen dari warga setempat agar proyek berhasil, melainkan juga diperlukan untuk menghindari “kebocoran” yang hanya akan menguntungkan pihak dari luar komunitas sebagaimana yang paling sering terjadi dalam pengelolaan pariwisata lokal (Place, 1998).

Partisipasi masyarakat oleh Marturano dan Gosling (2007) dibedakan dalam tiga jenis, yaitu partisipasi manipulatif, partisipasi simbolik dan partisipasi penuh. Partisipasi manipulatif adalah partisipasi semu dimana masyarakat lokal hanya sebatas diberitahu bahwa ada keputusan dan tindakan yang telah dibuat. Partisipasi simbolik adalah bentuk partisipasi dimana masyarakat lokal dikondisikan sedemikian rupa sehingga menyetujui keputusan dan tindakan yang sudah dibuat. Sedangkan partisipasi sebenarnya dimana masyarakat mendapatkan kendali penuh atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam komunitas mereka, dan isu-isu mengenai partisipasi masyarakat lokal diarahkan pada partisipasi jenis ini. Partisipasi juga digambarkan sebagai upaya yang terorganisir dari kelompok yang selama ini tereksklusi dari akses untuk mengontrol sumberdaya sehingga menjadi kelompok yang ikut serta dalam mengontrol sumber daya (Kiss 2004).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara semi terstruktur. Informan wawancara ditentukan secara purposif yang terdiri dari para pemilik *biliek* sekaligus figure-figur yang ditokohkan di rumah betang Ensaid Panjang. Penelitian ini berfokus pada

pengalaman para individu baik pengalaman pribadi maupun pengalaman sosial mengenai penetapan Ensaid Panjang sebagai Desa Wisata dan rumah betang sebagai Cagar Budaya. Sebagai penelitian naratif fokusnya yaitu memahami pengalaman masa lalu individu dan bagaimana pengalaman itu memberi kontribusi pada pengalaman masa sekarang dan masa depan. Peneliti memberi tekanan pada pengumpulan cerita oleh individu kepadanya atau dikumpulkan dari beragam *field texts*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ensaid Panjang cenderung dikaitkan dengan keberadaan bangunan eksotis berupa rumah panjang tradisional yaitu *betang*. Bangunan ini adalah salah satu dari sedikit betang yang masih tersisa. Betang Ensaid Panjang dibangun tahun 1986 dengan panjang mencapai 130 meter, terdiri dari 27 *bilik* dan masing-masing bilik diperuntukan bagi satu keluarga. Keunikan ini menjadikan Ensaid Panjang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sintang sebagai Desa Wisata dan betang Ensaid Panjang sendiri telah dicanangkan sebagai bangunan cagar budaya.

Adapun penghuni betang Ensaid Panjang berasal dari komunitas Dayak Desa yang telah menapaki perjalanan sejarah yang panjang. Menurut pengakuan orang-orang tua, suku Dayak Desa di Ensaid Panjang berasal dari garis keturunan dari nenek moyang yang pada jaman dahulu mendirikan koloni di Sijuk. Mereka adalah keturunan dari koloni orang Dayak Desa yang telah berkali-kali melakukan migrasi, sebelum akhirnya mendiami kawasan sungai Lebang dimana rumah panjang saat ini berdiri. Sebelum di lokasi yang sekarang, komunitas sudah berkali-kali membangun betang di lokasi yang berbeda-beda. Proses pendirian betang dilakukan secara gotong royong namun setiap keluarga bertanggung jawab dalam penyediaan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun *bilik* masing-masing. Bahan-bahan bangunan tersebut merupakan properti keluarga yang bersangkutan yang tidak boleh dibongkar untuk diambil materialnya selama bangunan betang masih berpenghuni meskipun keluarga yang bersangkutan memutuskan untuk keluar dari rumah betang. Betang bagi komunitas Dayak Desa di lokasi studi tidak hanya sebuah bangunan fisik, namun sarat dengan nilai-nilai dan

falsafah hidup yang dianut oleh komunitas di tempat itu.

Batang dianggap tidak hanya sebagai bangunan fisik tetapi juga merupakan alat untuk melambungkan kelompok kerabat yang tinggal dan mengaku sebagai anggota di dalamnya. Batang sangat menyatu dengan kehidupan sosial sehari-hari masyarakat suku Dayak Desa di tempat itu. Tata sosial dengan nuansa komunal yang khas seperti ini semakin sulit dijumpai di kalangan masyarakat Dayak pada umumnya, sebab dewasa ini cara hidup berkelompok dalam satu rumah panjang sudah tidak lagi dipraktekkan oleh masyarakat Dayak moderen.

Kehidupan sehari-hari di rumah betang kini sudah mengalami banyak perubahan. Gaya hidup nomaden sudah tidak lagi mereka praktekkan. Petunjuk-petunjuk alam tidak lagi banyak berpengaruh dalam praktek hidup mereka pada masa kini seiring dengan masuknya nilai-nilai baru melalui agama moderen, pendidikan dan interaksi dengan orang luar. Transformasi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia telah menempatkan Ensaid Panjang menjadi arena kontestasi beragam isu, mulai dari persolan akses kepada layanan dasar, hak atas tanah dan hutan serta pemanfaatannya, ketersediaan lapangan kerja alternatif, partisipasi dalam proses kebijakan hingga isu konservasi. Sementara itu, di tengah-tengah kompleksitas beragama isu yang ada, cara hidup tradisional komunitas Dayak Desa di Ensaid Panjang dihadapkan dengan apa yang dilabelkan sebagai “modernisasi”.

Tekanan-tekanan terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya mereka mengarah pada satu titik dimana cara pandang mereka terhadap betang dan kehidupan yang melingkupinya mulai berubah. Dibalik keunikan dan status sebagai cagar budaya dan desa wisata, ternyata para penghuni memiliki beragam pandangan mengenai pengalaman tinggal di betang di tengah-tengah perubahan yang ada. Tulisan ini mencoba mengetengahkan persepsi-persepsi yang berkembang mengenai hidup di betang, khususnya apa yang menarik minat para pemilik bilik untuk tetap bertahan di betang, dan sebaliknya, apa yang mendorong sebagian orang untuk meninggalkan kehidupan berkelompok di betang.

Para penghuni betang memiliki persepsi yang beragam mengenai Ensaid Panjang yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata. Pernyataan salah seorang narasumber di bawah ini menggambarkan bahwa keputusan untuk memelihara kehidupan di betang dengan tetap bermukim di sana bukan sepenuhnya kemauan para penghuni, melainkan untuk memenuhi harapan pemerintah dan orang-orang di luar komunitas. Seorang tokoh masyarakat sebagaimana dikutip mengatakan:

Kami, khususnya yang tinggal di betang ini, seperti yang banyak orang katakan, adalah sisa-sisa dari penghuni yang masih mau bertahan di betang. Sejujurnya, kalau kami mengikuti keinginan kami, tinggal di tempat seperti ini sudah tidak layak lagi. Tetapi orang justru beranggapan bahwa keberadaan rumah panjang yang ada di sini perlu dipertahankan. Mungkin karena satu-satunya betang yang masih ada. Namun perhatian pemerintah kepada kami hanya setengah hati. Kami selalu dihibur dengan janji-janji pembangunan saja.

Kunjungan wisatawan relatif rendah dan pendapatan yang diperoleh dari para wisatawan hanya berkontribusi untuk biaya pemeliharaan sebuah *bilik* di rumah betang yang memang dikhususkan untuk tamu yang menginap. Menurut penilaian salah satu tokoh masyarakat setempat, pemerintah hanya berwacana dengan konsep Desa Wisata tanpa ada tindakan nyata untuk memajukan pariwisata di tempat itu. Ada beberapa potensi daya tarik wisata yang seharusnya bisa dieksploitasi sedemikian rupa agar Ensaid Panjang memiliki nilai jual pariwisata, sebagaimana dicontohkan oleh seorang narasumber (Bb, 57 th) berikut ini:

Berbicara tentang pariwisata, sebenarnya air terjun perlu ditata sedemikian rupa. Kalau betang ini mungkin sudah cukup dikenal. Tetapi jika ditambah lagi tempat wisata air terjun, orang yang datang ke betang bisa melanjutkan ke air terjun. Jadi bukan hanya betang. Meskipun demikian, yang di betang juga belum cukup. Misalnya fasilitas penginapan dan sebagainya,

Selain hal-hal di atas, kebijakan pemerintah mengenai desa wisata dianggap tidak terkomunikasikan dengan baik di tingkat warga. Misalnya, terkait dengan ditetapkannya rumah betang sebagai bangunan cagar budaya, pengurus di rumah betang merasa kecewa atas pendekatan pemerintah yang dianggap membuat klaim sepihak. Narasumber tersebut mengungkapkan:

Pada waktu memasang papan bertuliskan “Cagar Budaya” mereka tidak berkompromi dengan warga di Ensaid Panjang. Mereka tiba-tiba saja menempelkan papan itu. Sebenarnya kami bisa saja memberi mereka sanksi adat karena hal itu sudah masuk dalam kategori salah basa (melanggar tatakrama). ... dan nyatanya setelah ditetapkan sebagai Cagar Budaya pun kami tidak mendapatkan kompensasi apa-apa.

Meskipun sudah ditetapkan sebagai bangunan Cagar Budaya, upaya perbaikan-perbaikan pada bagian-bagian betang yang sudah mulai rusak cenderung tidak memperhatikan aspek keaslian rumah betang. Padahal, wisatawan manca negara berharap agar betang menonjolkan aspek keasliannya sebagaimana pernah diungkapkan oleh wisatawan dari luar negeri yang pernah berkunjung ke betang kepada salah seorang tokoh masyarakat yang menjadi warga betang. Beberapa aspek keaslian yang menjadi harapan wisatawan manca negara tersebut diutarakan kembali oleh salah seorang pengurus di betang sebagai berikut:

Wisatawan Barat menginginkan lantai betang tetap menggunakan kayu bulat dan tidak diganti dengan papan. Sedangkan paku-paku saja harus dililit dengan rotan lagi supaya pakunya tidak terlihat. Jadi setelah dipaku, pakunya ditutup dengan ikatan rotan. Sekarang betang sudah direhap oleh suatu Dinas atau Badan dari Propinsi. Dahulunya pintu terbuat dari kulit kayu. Lantai ruai semuanya terbuat dari kayu bulat jenis kayu jengger. Karena pemimpin yang ada di betang kurang tegas maka bantuan yang diberikan tersebut sekehendak mereka saja.

Ditetapkannya Ensaid Panjang sebagai Desa Wisata sejauh ini tidak menimbulkan dampak positif secara ekonomi bagi kesejahteraan warga betang. Padahal warga berharap sektor pariwisata dapat mendatangkan pemasukan berupa uang melalui iuran yang dikutip dari tamu-tamu yang berkunjung. Seorang warga betang yang pernah menjadi pengurus kampung mengisahkan pengalaman pahit yang mereka terima terkait keinginan untuk mengambil iuran dari tamu-tamu yang berkunjung ke betang:

Waktu itu pernah kami atur sebuah skema. Kejadiannya di tahun 2009. Keinginan kami waktu itu begini: kalau ada orang berkunjung ke betang, ada petugas di betang yang menyiapkan kain tenun berupa syal yang dikenakan pada setiap pengunjung dan mereka membayar untuk itu. Maksud kami, mereka membayar untuk masuk ke betang tetapi bukan membayar syal karena syal akan diambil kembali ketika tamu pulang. Dan kalau tamu berkunjung ke air terjun, perlakuannya juga begitu. Namun upaya kami tersebut tidak berjalan lama karena kami dituduh sebagai peminta-minta. Alasan mereka karena belum ada Peraturan Desa yang mengatur itu. Yang mengatakan itu adalah orang dari Pariwisata sendiri. Kami dituduh melakukan pungutan liar. Setelah kejadian itu, daripada membuat kegaduhan, kami pun berhenti melakukan pungutan-pungutan.

Sebagian penghuni sudah merasakan bahwa hidup di betang tidak lagi menarik. Kegiatan pariwisata justru dianggap beban. Beberapa warga sudah lama memutuskan untuk keluar dari betang. Seorang warga yang pada tahun 1995 memutuskan untuk keluar dari rumah betang, dengan gestur yang terkesan tidak ingin menyinggung perasaan orang lain atas keputusannya, mengatakan:

Saya minta maaf untuk mengatakan hal ini. Pada masa-masa itu orang-orang Barat setiap bulan, kadang sebulan dua kali hingga tiga kali, berkunjung ke rumah betang. Saat saya akan melakukan suatu pekerjaan di tempat lain petugas atau Kepala Kampung

mengajak saya dan warga betang lainnya untuk kerja bakti. Akhirnya saya berpikir apabila saya masih tetap tinggal di rumah betang maka kondisinya akan seperti itu terus. Saya ambil inisiatif untuk membayar orang yang pandai menggunakan chainsaw untuk menebang pohon dan menjadikannya sebagai bahan bangunan. Lalu saya mendirikan rumah di atas lahan pribadi di lokasi transmigrasi. Di rumah sendiri saya bebas untuk bekerja atau beristirahat karena tidak ada yang memerintah. Selain itu saya berpikir pada waktu itu, jika anak-anak saya sekolah dan bernasib baik hingga bisa menjadi sarjana maka mereka pun akan malu tinggal di rumah betang.

Keputusan untuk keluar dari rumah betang juga disampaikan oleh mantan Ketua Adat yang memutuskan untuk mendirikan rumah sendiri tidak jauh dari betang. Tokoh tersebut mengatakan:

Saya masih punya bilik di betang, letaknya di tengah-tengah betang. Saya keluar dari betang karena anak saya banyak dan kebetulan ada tanah kosong. Lebih enak di luar karena anak-anak bisa memiliki lahan sendiri.

Eksistensi betang tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial-ekonomi tradisional masyarakat Dayak Desa di lokasi studi. Dorongan untuk hidup dengan prinsip ekonomi adalah salah satu faktor yang menyebabkan pergeseran pandangan mengenai tradisi. Sebagaimana dikutip, narasumber tersebut mengatakan:

Kami serba salah, ingin mempertahankan tradisi seperti itu tetapi waktu kami akan sangat tersita oleh hal-hal seperti itu. Tuntutan hidup di jaman sekarang sudah tidak memungkinkan kami untuk selalu menjalankan tradisi.

Berdasarkan paparan narasi dari para pemangku kepentingan di rumah betang diketahui bahwa konsep cagar budaya dan desa wisata yang dilekatkan kepada desa Ensaid Panjang, kurang menekankan pada partisipasi

masyarakat setempat secara utuh. Partisipasi yang ada bersifat manipulatif atau semu dimana masyarakat lokal hanya sebatas diberitahu bahwa ada keputusan dan tindakan yang telah dibuat. Menurut Nyaupane *et al* (2006), keterbatasan-keterbatasan yang umumnya dihadapi masyarakat lokal dalam mengimplementasikan kegiatan wisata menyangkut pendanaan, infrastruktur, pengetahuan, dan potensi ketidakcocokan diantara pejabat publik.

Akan tetapi mengoptimalkan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata juga tidak mudah. Penelitian yang dilakukan He *et al* (2006) di wilayah perdesaan di Cina menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan umumnya tidak mampu berinvestasi untuk pengelolaan ekowisata karena tidak memiliki modal keuangan serta modal pengetahuan karena pendidikan yang rendah, ataupun karena tidak terlibat dalam proses formulasi kebijakan maupun dalam pengimplementasiannya. Kondisi ini hanya akan memberi peluang yang lebih besar kepada pelaku dari luar untuk memanfaatkan ketidakberdayaan masyarakat lokal untuk kepentingan-kepentingan lain.

Tosun (2000) memaparkan tiga faktor penghambat bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi, masing-masing diidentifikasi sebagai hambatan operasional, hambatan struktural dan hambatan kultural. Hambatan operasional dapat berupa sentralisasi dalam administrasi pengelolaan pariwisata sehingga menyulitkan masyarakat lokal untuk terlibat. Hambatan struktural juga termasuk ketiadaan atau lemahnya koordinasi akibat adanya fragmentasi dalam industri pariwisata. Hambatan struktural juga berupa kenyataan bahwa banyak pihak lebih sering menghindari negosiasi dengan masyarakat lokal atau masyarakat lokal tidak dalam posisi yang layak untuk bernegosiasi karena tidak memiliki sumber daya manusia handal dan tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai. Sementara hambatan kultural terkait dengan rendahnya kesadaran masyarakat lokal mengenai akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dan pengembangan wisata, baik dari sisi sosio-kultural, ekonomi maupun politik. Sedangkan

Scheyvens (1999) mengetengahkan dua argumen mengapa masyarakat lokal sulit terlibat dalam pengelolaan pariwisata: 1) heterogenitas dalam masyarakat yang disebabkan berbagai perbedaan, termasuk perbedaan pendapat dan aspirasi mengenai pariwisata, dan 2) masyarakat lokal sering tidak memiliki informasi, sumberdaya dan kekuatan sehingga sulit bagi mereka untuk menembus pasar.

Kesimpulan

Status Desa wisata tidak mampu menjadi strategi mitigasi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas betang Ensaid panjang. Pada konteks tertentu justru memberi tekanan atau gangguan (*disturbance*) sehingga sistem sosial-ekologi tradisional menjadi labil. Oleh sebab itu proyek-proyek pembangunan harus lebih sensitif kepada isu-isu masyarakat asli agar pembangunan mampu memberikan ruang yang cukup bagi eksistensi sistem sosial dan budaya lokal sehingga intervensi pemerintah melalui program-program pembangunan tidak menghilangkan kapasitas yang sudah dimiliki oleh komunitas namun justru semakin memperkuat modal-modal yang sudah ada seperti modal sosial, modal budaya dan modal alam.

Daftar Pustaka

- Cox, L.J. dan Cusick, J. (2006). What is sustainable development? CTAHR Department of Natural Resource Management, University of Hawaii Mānoa Environmental Center
- Drumm, A. 1998. New Approaches to Community-Based Ecotourism Management: learning from Ecuador. Dalam *Ecotourism: A Guide for Planners and Managers*, eds. K. Lindberg, M. Epler Wood and D. Engeldrum, 197-213. Ecotourism Society, Vermont.
- Eshun, G. dan Tonto, J.N.P. (2014). Community-based ecotourism: Its socio-economic impacts at Boabeng-Fiema Monkey Sanctuary, Ghana
- He, G., *et al*. 2006. Distribution of Economic Benefits from Ecotourism: A Case Study of Wolong Nature Reserve for Giant Pandas in China. *Environmental Management*, 42:1017-1025.

- Kiss, A. 2004. Is community-based ecotourism a good use of biodiversity conservation funds? *Trends in Ecology & Evolution*, 19 (5): 232-237.
- Liu, Z.H. (1994). Tourism development – a systems analysis. In A.V. Seaton *et al.* (eds) *Tourism: The State of the Art* (pp. 20–30). Chichester: John Wiley.
- Liu, Z.H. (2003). Sustainable tourism development: A critique. *Journal of Sustainable Tourism* 11 (6), 459–475.
- Marturano, A. dan Gosling, J. 2008. *Leadership, the key concepts*. New York, U.S.A: Routledge.
- Nyaupane, G., Morais, D. dan Dowler, L. 2006. The role of community involvement and number/type of visitors on tourism impacts: A controlled comparison of Annapurna, Nepal and Northwest Yunna, China. *Tourism Management*, 27 (6): 1373-1385.
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Journal of Tourism Management* 20 (2), 245–249
- Su, M. . 2014. Assessing Ecotourism from a Multi-stakeholder Perspective: Xingkai Lake National Nature Reserve, China. *Environmental Management*, (54):1190–1207.